

Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010

Mohamad Rosyidin

Abstract

This paper seeks to interpret and evaluate President Yudhoyono's diplomatic approach towards Malaysia regarding the captured of three Indonesian officials in 2010 by Malaysian Maritime Police. It is interesting since violation of state sovereignty had triggered mass protest in Indonesia, the executive ignored the public demand. Rather than using coercive approach, the Indonesian elite employed soft diplomacy to engage Malaysia towards win-win solutions. This paper argues that Yudhoyono's foreign policy towards Malaysia in this context is counterproductive to increase nation's self-esteem. Yudhoyono's soft diplomacy only matters for short term interest but not for long term one. This paper argues that the strategy chosen by President Yudhoyono is rooted from his misconception of soft power. This paper also suggest that soft power alone is insufficient to serve national interest; it need to be combine with hard power. As such, the effective diplomacy is smart power; the combination of soft and hard power which is compatible to the Second Principle of Pancasila.

Keywords: soft diplomacy, soft power, SBY's foreign policy, smart power

Pendahuluan

Hubungan Indonesia-Malaysia ibarat *roaller-coaster* yang selalu naik-turun. Terkadang hubungan negara serumpun itu hangat, terkadang memanas. Salah satu peristiwa yang membuat hubungan kedua negara memanas adalah insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi laut Malaysia pada 13 Agustus 2010 lalu. Ketiga petugas itu sebelumnya telah menahan tujuh nelayan Malaysia karena tertangkap basah sedang mencuri ikan di perairan Bintan, Indonesia. Ketiga petugas itu pun mendapat perlakuan buruk dari petugas Malaysia. Anehnya, pada saat opini publik begitu kencang mengecam tindakan Malaysia itu dan menuntut respon tegas dari pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru memakai pendekatannya sendiri. Alih-alih melakukan protes keras

atau mengirim pasukan militer untuk menggertak Malaysia, Presiden SBY memilih langkah diplomasi untuk meredakan ketegangan antar kedua negara. Setelah pemerintah Indonesia mengembalikan tujuh nelayan Malaysia, kasus pun tuntas dengan dikembalikannya ketiga petugas KKP ke tanah air.

Walaupun pendekatan diplomatik SBY telah berhasil menurunkan tensi hubungan Indonesia-Malaysia, publik kecewa karena pemerintah dianggap terlalu 'ramah' terhadap Malaysia yang sering berbuat ulah. Pemerintah dituduh tidak punya wibawa dan harga diri di hadapan Malaysia. Ketidakmampuan pemerintah bersikap tegas kepada Malaysia mencerminkan rendahnya posisi tawar Indonesia di hadapan Malaysia. Padahal pihak Malaysia menantang Indonesia dengan melontarkan kecaman keras atas tindakan publik Indonesia mengobarkan kampanye anti-Malaysia. Menanggapi demonstrasi anti-Malaysia yang marak terjadi di Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, "Malaysia adalah bangsa yang penyabar. Harus ada tindakan untuk memastikan bahwa demonstrasi bisa dikendalikan sebelum bangsa Malaysia kehilangan kesabaran" (vivanews 2010). Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai kesiapan Malaysia untuk berkonflik dengan Indonesia. Namun dalam menanggapi situasi konfliktual seperti itu, pemerintah berjalan sendirian dalam memutuskan kebijakan luar negeri apa yang akan diambil terlepas dari aspirasi publik.

Tulisan ini hendak menafsirkan dan mengevaluasi kebijakan luar negeri Presiden SBY dalam kasus penangkapan tiga petugas KKP oleh petugas Malaysia. Secara spesifik, tulisan ini mengkaji strategi kebijakan luar negeri SBY dalam konteks konflik hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Di samping itu, tulisan ini menawarkan masukan berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait bagaimana seharusnya memilih strategi diplomasi yang tepat khususnya dalam situasi konfliktual.

Tulisan ini mengaplikasikan konsep *power* dalam studi Hubungan Internasional untuk mendeskripsikan perilaku politik luar negeri SBY terhadap Malaysia. Untuk menganalisis strategi diplomasi SBY, tulisan ini mengaplikasikan pemikiran Joseph Nye tentang tipologi *power* yaitu *soft power*, *hard power*, dan *smart power* (Nye 2004; 2009; 2011a; 2011b). Argumen dalam tulisan ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data pendukung terutama digali dari pendapat para ahli yang tulisannya tersebar di berbagai karya ilmiah baik berupa buku dan jurnal ilmiah dan pernyataan para pembuat kebijakan dalam bentuk teks pidato dan pernyataan-pernyataan di media massa. Meskipun sebagian besar data merupakan data kualitatif, namun tulisan ini juga memasukkan data kuantitatif sebagai data pendukung.

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa strategi kebijakan luar negeri yang dipakai SBY dalam menghadapi situasi konfliktual dengan Malaysia kurang tepat dan cenderung berdampak negatif terhadap wibawa dan harga

diri bangsa. Pemerintah tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang diambil dalam jangka panjang. Akar dari pilihan strategi diplomasi tersebut adalah kepercayaan yang terlalu berlebihan pada *soft power* yang dianggap sarana paling efektif dalam hubungan internasional abad-21. Tulisan ini berpendapat bahwa kesalahpahaman pemerintah terhadap konsep *soft power* turut berperan dalam pemilihan strategi diplomasi yang kurang tepat. *Soft power* bukan satu-satunya alat diplomasi dan terkadang tidak efektif dalam situasi konfliktual.

Tulisan ini mengajukan saran bahwa dalam menyikapi tindakan negara lain yang cenderung konfrontatif, pemerintah semestinya mengambil strategi kebijakan luar negeri yang tepat tanpa mengorbankan kewibawaan dan harga diri bangsa. Dalam kaitan ini, penulis tidak menganjurkan menggunakan strategi yang bersifat konfrontatif-emosional, melainkan strategi yang berhati-hati (*prudent*) dalam pengertian strategi itu nantinya tidak beresiko melemahkan wibawa dan harga diri bangsa di hadapan bangsa lain. Menurut para penganut aliran realisme politik, diplomasi yang *prudent* berarti diplomasi yang meletakkan konsekuensi politik sebagai parameter rasionalitas kebijakan luar negeri. Konsekuensi politik ini seharusnya menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan sebelum keputusan penting diambil. Mengabaikan pertimbangan ini berpotensi memperlemah posisi tawar Indonesia di hadapan negara lain.

Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan menjelaskan konsep *power* dan tipologinya untuk menjelaskan diplomasi sebagai strategi pelaksanaan politik luar negeri. Bagian kedua akan mengaplikasikan konsep *soft power* pada kasus hubungan Indonesia-Malaysia terkait penangkapan tiga petugas KKP oleh petugas Malaysia. Bagian ketiga adalah kesimpulan dan rekomendasi.

Kerangka Teori: Tipologi *power* sebagai alat diplomasi

Diplomasi senantiasa berhubungan dengan strategi penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Kekuasaan atau dalam bahasa ilmu politik '*power*' adalah kemampuan membuat pihak lain melakukan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh pihak tersebut (Dahl 1957: 202-203). Morgenthau (1978: 30) mengatakan bahwa, "Ketika kita membicarakan tentang kekuasaan, yang kita maksud adalah pengendalian seseorang terhadap pikiran dan tindakan orang lain." Dalam pengertian yang berbeda, *power* bisa berarti sumberdaya (*resources*) yang berguna untuk mencapai tujuan dalam proses tawar-menawar atau negosiasi. Oleh sebab itu, *power* dalam politik internasional ibarat uang dalam ekonomi pasar (Wolfers 1962: 105). Ibarat dalam proses jual-beli, baik penjual maupun pembeli dituntut piawai menggunakan *power* agar mampu menghindari kerugian dan memperbesar keuntungan. Begitu

pula dengan negarawan, kepiawaian menggunakan *power* ketika melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain sangat menentukan keberhasilan politik luar negerinya. Negarawan yang kurang piawai menggunakan *power* akan menyebabkan negaranya menderita kerugian dalam hal pencapaian kepentingan nasional. Sebaliknya, negarawan yang piawai memainkan *power*-nya, maka negara lain akan berpikir dua kali untuk mempermainkan negara tersebut. Pendek kata, *power* menempati posisi sentral dalam dunia diplomasi.

Sebagai konsep yang abstrak, *power* tidak dapat diketahui hanya dari indikator-indikator yang bersifat material. Hans Morgenthau dalam risalah klasiknya, *Politics Among Nations* (Morgenthau 1978: 117) membagi kategori *power* menjadi dua macam yaitu *power* yang relatif stabil dan *power* yang cenderung berubah atau tidak konstan. *Power* yang relatif stabil adalah sumberdaya-sumberdaya yang bersifat material dan dapat diukur misalnya luas wilayah (geografi), jumlah penduduk (demografi), kapasitas industri, kekuatan militer, serta potensi sumberdaya alam. Sedangkan *power* yang cenderung berubah adalah sumberdaya-sumberdaya yang bersifat imaterial dan tak dapat diukur seperti karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Kedua jenis *power* tersebut tidak dapat direduksi satu sama lain. Artinya, *power* yang relatif stabil tidak lebih penting daripada *power* yang cenderung berubah dan sebaliknya. Keduanya merupakan elemen vital kekuatan nasional sebuah negara supaya dapat memenangkan kompetisi dan kerjasama (*discord and collaboration*) di percaturan politik internasional.

Studi paling mendalam dan komprehensif mengenai *power* dilakukan oleh Joseph Nye. Karya-karyanya banyak membahas tentang hakekat *power* dalam hubungan luar negeri. Studi Nye mengenai *power* sebenarnya dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Amerika Serikat mengingat Nye pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Intelijen Nasional. Akan tetapi, buah karyanya telah dibaca secara luas oleh para pemimpin dunia sehingga pemikirannya sangat mempengaruhi politik luar negeri negara-negara lain di luar Amerika.

Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah mengenai tipologi *power*. Nye membagi *power* menjadi tiga macam yaitu *hard power*, *soft power*, dan *smart power* (Nye 2004; 2009; 2011a; 2011b). Sebetulnya pembagian tersebut bukan gagasan yang sama sekali baru karena sebelumnya sudah disebutkan bahwa Hans Morgenthau juga membagi *power* menjadi dua macam. Bedanya adalah tipologi *power* versi Morgenthau hanya berdasarkan pada sifat dari sumber-nya, sedangkan tipologi Nye berdasarkan pada sifat dari penggunaannya. Dengan kata lain, tipologi Morgenthau dimaksudkan untuk membagi bermacam-macam sumber atau elemen kekuatan nasional suatu negara

(*elements of national power*), sedangkan tipologi Nye dimaksudkan untuk membagi cara kerja *power* dalam menghasilkan tujuan yang dikehendaki.

Secara sederhana, *hard power* dimaknai sebagai penggunaan sarana-sarana koersi untuk mencapai tujuan. Memerintahkan orang lain untuk melakukan apa yang seseorang inginkan adalah elemen dari *hard power*. Orang tersebut dapat melakukannya karena ia memakai pendekatan 'imbalan dan hukuman' (*reward and punishment*) atau strategi 'tongkat dan wortel' (*stick and carrot*). Jika orang yang diperintahkan tersebut bersedia melakukan apa yang diinginkan oleh yang memerintahkannya, maka orang itu akan diberi imbalan. Akan tetapi jika menolak, maka akan diberi hukuman. Aspek psikologis memainkan peran dalam *hard power*. Orang itu menyadari bahwa ia sedang diperintah (di bawah tekanan). Sehingga dalam situasi ini, relasi antara pihak satu dan pihak lain bersifat hirarkis atau patron-klien. Dalam hubungan internasional, sumber *hard power* adalah kekuatan militer dan ekonomi. Para penganut teori realis percaya bahwa kedua sumberdaya material tersebut adalah elemen terpenting kekuatan nasional suatu negara.

Berbeda dengan *hard power* yang bersifat koersif, *soft power* lebih menekankan pada pendekatan *co-optive* (persetujuan). Artinya, pihak lain melakukan apa yang kita inginkan bukan karena ia berada dalam tekanan, melainkan karena ia setuju dengan pemikiran atau tindakan kita sehingga ia bersedia mengikutinya.¹ Strategi *soft power* bukan memberi imbalan atau hukuman, melainkan 'menciptakan situasi' atau *agenda setting*. Ketika pihak lain tertarik atau terkesan dengan gagasan atau perilaku kita, maka hal itu dapat mempengaruhi cara ia berpikir dan merumuskan tujuan yang pada gilirannya mempengaruhi tindakannya. Analogi yang digunakan Nye (1990: 181) adalah orang tua akan lebih efektif dalam mengontrol anak-anak remajanya jika ia mampu membentuk keyakinan dan pikiran anak-anaknya. *Soft power* sama pentingnya dengan *hard power*. Bila suatu negara mampu memperlihatkan legitimasi kekuasaannya di mata negara lain, maka ia dapat terhindar dari sikap resisten atau melawan dari negara lain. Jika budaya dan ideologi yang ia anut menarik, pihak lain akan mengikutinya. Jika ia mampu mempromosikan norma internasional yang konsisten dengan masyarakatnya, maka ia tidak perlu berubah (Nye 1990: 167). Justru pihak lain akan mendukung dan mengikuti norma tersebut. Jadi negara tak perlu menguras banyak biaya sebagaimana *hard power* untuk membuat pihak lain mengikutinya.

1 Konsep *soft power* mirip dengan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci. Menurut perspektif Gramscian, hegemoni secara bebas dapat dimaknai sebagai "manipulasi ideologi oleh kelas penguasa sehingga seolah-olah menguntungkan semua pihak". Ini berbeda dengan konsep *soft power* yang tidak mengandung manipulasi tetapi "promosi nilai-nilai, ideologi, budaya, dan norma untuk menarik pihak lain". Namun begitu, keduanya sama-sama menekankan pada strategi untuk menguasai. Konsep *soft power* juga berbeda dengan konsep Ideological State Apparatus (ISA) dari Louis Althusser yang dimaknai sebagai *institusi-institusi sosial* yang melanggengkan ideologi pemerintah.

Meskipun demikian, *soft power* hendaknya dibedakan dengan pengaruh (*influence*). Seseorang mampu mempengaruhi orang lain tetapi belum tentu mempunyai kekuasaan atas orang tersebut. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai kekuasaan belum tentu mampu mempengaruhi orang lain (*powerless*). Morgenthau (1978: 31) mencontohkan, seorang menteri luar negeri bisa mempengaruhi kebijakan seorang presiden namun ia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada presiden, sebaliknya presiden mampu memaksakan kehendaknya kepada menteri luar negeri semata-mata karena ia punya otoritas. Nye (2004: 6) mengatakan bahwa pengaruh bisa saja muncul dari *hard power*, sedangkan *soft power* lebih dari sekedar pengaruh. *Soft power* lebih dari sekedar persuasi atau kemampuan memerintahkan pihak lain menggunakan kekuatan argumen. *Soft power* adalah kemampuan membuat pihak lain tertarik sehingga ia akan memberikan persetujuannya. Persetujuan berarti kerelaan untuk menerima. Secara psikologis pihak yang dikenai *soft power* tidak menyadari kalau dia sedang dikuasai. Itulah yang diingatkan oleh Nye pasca serangan teroris 11 September 2001. Bila Amerika terlalu mengedepankan arogansi dan intoleransi, maka Amerika akan semakin rapuh (Nye 2002: xvi).

Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, *soft power* adalah instrumen diplomasi yang semakin diperlukan. Napoleon Bonaparte pernah berujar, "Hanya ada dua kekuatan di dunia, pedang dan pikiran. Di masa depan pedang akan dikalahkan oleh pikiran" (Heinl 1966: 318). Perkataan Napoleon tersebut menemukan relevansinya dalam konteks politik internasional abad-21 seiring semakin banyak negara yang memanfaatkan *soft power* daripada *hard power* yang mengedepankan cara-cara militer. Diplomasi kebudayaan merupakan contoh pemanfaatan *soft power* dalam mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Banyak negara mulai mempromosikan beragam aset budaya yang dimilikinya untuk menarik perhatian dunia internasional. Jepang dan Korea Selatan adalah sedikit negara yang cukup berhasil memanfaatkan budaya mereka untuk mendukung tujuan kebijakan luar negerinya.

Meskipun *soft power* sangat cocok dipakai dalam iklim globalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat, ia bukan solusi bagi semua persoalan yang dihadapi negara. Tantangan abad-21 tidak hanya keamanan non-tradisional, namun ancaman tradisional dari negara lain tetap sangat besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan *hard power*. Ia tetap relevan sebagai penyokong kesuksesan *soft power*. Kombinasi antara *hard power* dan *soft power* disebut *smart power* (Nye 2011: xiii). Pakar diplomasi S. L. Roy (1984: 19) menyatakan bahwa, "Hakikat diplomasi yang sukses adalah kemampuan menempatkan penekanan yang benar pada setiap keadaan tertentu pada satu atau lebih instrumen diplomasi, termasuk penggunaan kekuatan." Pernyataan ini mengimplikasikan kapan pun negosiasi damai dilaksanakan, kekuatan koersif berdiri di belakang

(siap siaga), dan bila dibutuhkan, ia dibawa ke depan sebagai ancaman, jika ancaman gagal kekuatan koersif digunakan secara terbuka. Kekuatan militer sebagai sarana pemaksa atau alat kekerasan merupakan bagian integral dari diplomasi dalam dunia yang anarki (Roy 1984: 20). Jadi *smart power* adalah kunci sukses diplomasi yang cerdas (*smart diplomacy*). Mengedepankan *hard power* saja dapat memicu kebencian dan permusuhan dari negara lain. Mengedepankan *soft power* saja dapat menimbulkan resiko jangka panjang lemahnya posisi tawar di hadapan negara lain. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam hubungan antar negara harus dimaknai dalam kerangka penggunaan *smart power* secara canggih.

Soft power dan diplomasi SBY

Kasus penangkapan tiga petugas KKP oleh Polisi Maritim Malaysia di perairan Bintan memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berujung pada tindakan saling kecam. Kemarahan publik memang beralasan sebab selain telah melanggar kedaulatan karena memasuki wilayah Indonesia, tindakan aparat Malaysia yang menangkap tiga petugas KKP tersebut disertai dengan kekerasan. Menanggapi tindakan 'kurang ajar' Malaysia tersebut, opini publik menghendaki ketegasan dari pihak Indonesia. Tuntutan itu memang terkesan emosional dan reaktif. Morgenthau (1978: 265) pernah menyatakan bahwa kebijakan luar negeri seringkali tidak sejalan dengan opini publik. Namun secara normatif, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya memberikan tindakan tegas karena apa yang dilakukan oleh Malaysia itu sudah mengancam kepentingan nasional Indonesia, khususnya menyangkut kedaulatan dan perlindungan terhadap warga negara.

Awalnya pemerintahan SBY mengajukan nota protes sebagai reaksi atas peristiwa tersebut. Namun protes Indonesia ternyata tidak diiringi dengan tindakan tegas pemerintahan SBY. Pada akhirnya, SBY memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam pidatonya di Markas Besar TNI, SBY mengemukakan alasan mengapa Indonesia memilih pendekatan diplomatik. *Pertama*, faktor sejarah. "Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat, dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun" (detik 2010). Di samping itu, diplomasi penting karena untuk menjaga keutuhan ASEAN. *Kedua*, faktor strategis. Ada sekitar dua juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia serta tiga belas ribu pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia. Wisatawan Malaysia di Indonesia adalah ketiga terbesar di dunia. Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US\$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US\$ 534 juta. Jumlah

perdagangan kedua negara telah mencapai US\$ 11,4 miliar pada tahun 2009 (Yudhoyono 2010).

Tabel-tabel di bawah ini memperkuat alasan SBY di balik keputusan memilih strategi diplomatik ketimbang strategi koersi terhadap Malaysia. Dari aspek perdagangan, pada tahun 2009 neraca perdagangan Indonesia-Malaysia mengalami defisit dalam sektor migas. Meskipun demikian, surplus perdagangan terjadi dalam sektor non-migas. Sementara dari aspek penempatan tenaga kerja migran, Malaysia merupakan negara tujuan terbesar kedua setelah Arab Saudi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 123.886 orang. Lalu dari aspek investasi langsung, Malaysia menempati peringkat ke-10 yang pada tahun 2009 saja mencakup 75 proyek dengan total investasi sebesar \$129.3 juta. Pendek kata, Malaysia terlalu menguntungkan bagi Indonesia sehingga SBY memilih pendekatan lunak untuk menjaga agar keuntungan tadi tidak lepas dari Indonesia.

Tabel 1. Neraca perdagangan Indonesia-Malaysia tahun 2009 (ribu US\$)

URAIAN	2009
TOTAL PERDAGANGAN	12.500.255,0
MIGAS	3.679.653,2
NON MIGAS	8.820.601,8
EKSPOR	6.811.823,5
MIGAS	1.175.451,8
NON MIGAS	5.636.371,8
IMPOR	5.688.431,5
MIGAS	2.504.201,5
NON MIGAS	3.184.230,0
NERACA PERDAGANGAN	1.123.392,1
MIGAS	-1.328.749,7
NON MIGAS	2.452.141,8

Sumber: kemendag.go.id

Tabel 2. Penempatan Per Tahun Per Negara (10 Besar Negara Penempatan)

No	Negara Penempatan	Tahun										Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
1	Saudi Arabia	281,087	257,217	234,644	276,633	228,890	137,643	11,814	1,427,928			
2	Malaysia	219,658	222,198	187,123	123,886	116,056	134,108	46,296	1,049,325			
3	Taiwan	45,706	50,810	59,522	59,335	62,048	73,498	30,669	381,588			
4	Singapore	28,661	37,496	21,807	33,077	39,623	47,781	20,430	228,875			
5	United Emirate Arab (UAE)	22,685	28,184	38,092	40,391	37,337	39,857	14,274	220,820			
6	Hongkong	20,100	29,973	30,204	32,417	33,262	50,283	18,237	214,476			
7	Kuwait	24,600	25,756	29,218	23,041	563	2,723	693	106,594			
8	Qatar	7,980	10,449	8,582	10,010	13,559	16,578	8,476	75,634			
9	Yordania	10,978	12,062	11,155	10,932	5,695	134	29	50,985			
10	Oman	5,210	7,150	8,309	9,700	9,259	7,292	3,375	50,295			

Sumber: BNP2TKI

Tabel 3. Peringkat 20 Besar Realisasi FDI Menurut Negara (2009)

No	Negara/Country	Proyek/ Project	Nilai/Value (US\$ Juta/Us\$ Million)	%
1	Singapura/ <i>Singapore</i>	189	4.341,0	40,1
2	Belanda/ <i>Netherlands</i>	32	1.198,7	11,1
3	Jepan/ <i>Japan</i>	124	678,9	6,3
4	Korea Selatan/ <i>South Korea</i>	186	624,6	5,8
5	Inggris/ <i>United Kingdom</i>	61	587,7	5,4
6	Seychel/ <i>Seychelles</i>	4	322,2	3,0
7	Amerika Serikat/ <i>United States of America</i>	27	171,5	1,6
8	Mauritius/ <i>Mauritius</i>	6	159,5	1,5
9	Swiss/ <i>Switzerland</i>	11	132,1	1,2
10	Malaysia/ <i>Malaysia</i>	75	129,3	1,2
11	Jerman/ <i>Germany</i>	18	103,9	1,0
12	Australia/ <i>Australia</i>	26	79,7	0,7
13	R.R. China/ <i>People's Republic China</i>	37	65,5	0,6
14	Muang Thai/ <i>Thailand</i>	4	51,4	0,5
15	Italia/ <i>Italy</i>	11	41,1	0,4
16	Taiwan/ <i>Taiwan</i>	36	31,7	0,3
17	Perancis/ <i>France</i>	12	29,0	0,3
18	India/ <i>India</i>	31	26,2	0,2
19	Hongkong/ <i>Hong Kong (SAR)</i>	18	21,0	0,2
20	Emirat Arab/ <i>Arab Emirat</i>	3	15,5	0,1
21	Gabungan Negara/ <i>Joint Countries</i>	310	2.004,7	18,5
Jumlah/Total		1.221	10.815,2	100,0

Sumber: BKPM dalam CDMI Consulting

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, Indonesia perlu berpikir tentang resiko yang akan ditanggung Indonesia jika pemerintah nekat menggunakan pendekatan koersif kepada Malaysia. Menurut peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardani, Malaysia adalah anggota aliansi Five Power Defence Arrangements (FPDA) bersama dengan Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Menurut perhitungannya, jika Indonesia mengambil sikap keras terhadap Malaysia maka Indonesia akan dikeroyok oleh empat negara tersebut (vivanews 2010). Pertimbangan pemerintah memilih tindakan lunak terhadap Malaysia didorong oleh alasan moral dan rasional.

Pendekatan SBY dalam menyelesaikan persoalan itu dikritik banyak kalangan. Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, "Apa kita harus berbaikan ketika tiga petugas KKP kita ditangkap. Kalau ingin baik dengan semua orang, menurut pengalaman, kita justru tidak dihargai, karena tidak punya pendirian" (tribunnews 2010). Komisi I DPR RI yang membidangi masalah luar negeri juga mengkritik kebijakan yang diambil SBY sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Anggota Komisi I Sidharto

Danusubroto mengatakan, "Ini bukan soal diplomasi, tapi sudah menginjak-injak harga diri kita" (tribunnews2010). Hikmahanto Juwana juga mengirimkan pesan kepada pemerintah bahwa pelecehan yang dilakukan oleh petugas Malaysia kepada petugas KKP menciptakan kesan arogansi Malaysia di mata publik Indonesia (kompas 2010). Kritikan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara aspirasi rakyat dan respon pemerintah. Menurut peneliti CSIS Philip Vermonte, pemerintah adalah 'pemimpin', bukan 'budak' opini publik (liputan6 2010). Apapun kritik dan kecaman yang dilayangkan kepada pemerintah, diplomasi santun (*soft diplomacy*) tetap menjadi gaya diplomasi khas seorang SBY.

Soft diplomacy SBY berakar dari pandangan bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah hubungan antar negara tidak bisa dan tidak akan berhasil jika menggunakan cara-cara keras atau paksaan. Pada pidato pembukaan 13th General Assembly of The Veterans Confederations of ASEAN Countries, 27 Juli 2010, SBY mengatakan abad-21 berbeda dari abad-20 karena abad-21 adalah abad *soft power* (Faizasyah 2012: 58). *Soft power* dianggap lebih efektif ketimbang *hard power*. SBY (2008) mengungkapkan pentingnya penggunaan strategi *soft power* ini di hadapan para diplomat Indonesia.

Dan kemudian berkali-kali saya sampaikan mari kita gunakan *soft power*. *Soft power*, sering, sangat atau lebih efektif dibandingkan dengan *hard power*. Seelok-eloknya kita menyelesaikan masalah dengan mengedepankan *soft power* dan kita buktikan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam negeri pun dengan *soft power approach* ternyata banyak yang lebih berhasil dibandingkan menggunakan pendekatan tradisional seperti dulu, *security approach* yang berlebihan.

Senada dengan SBY, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (2010) juga mengatakan bahwa *soft power* akan menempati posisi sentral dalam politik luar negeri Indonesia. Ketika berbicara di Universitas Harvard tahun 2009 lalu, SBY mengulangi komitmennya terhadap *soft power*. Ia mengatakan bahwa jika abad-20 adalah abad *hard power*, maka abad-21 adalah abad *soft power* (Yudhoyono 2009). *Hard power* menyebabkan konflik, sementara *soft power* menyebabkan kerjasama dan harmoni. Pandangan hitam-putih SBY tentang *power* tersebut membuatnya beranggapan bahwa *hard power* tidak relevan lagi dalam situasi sekarang ini yang menuntut negara lebih banyak melakukan kerjasama ketimbang konflik. Militer dianggap instrumen usang dalam berdiplomasi yang identik dengan masa perang. Pada era dimana perang digantikan oleh kerjasama, pemilihan strategi *soft power* adalah kebijakan yang dipandang sejalan dengan globalisasi (Rosyidin 2012: 413).

Akan tetapi, globalisasi tidak melulu identik dengan kerjasama. Globalisasi juga menyimpan sisi gelap berupa benturan kepentingan yang

tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari tingkat interaksi antar aktor internasional yang kian intensif. Globalisasi juga memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang mengubah struktur kekuasaan global menjadi multipolar. Perkembangan ini bukan berarti menjadikan dunia semakin damai dan stabil. Justru sebaliknya, konflik antar negara dan tingkat kerawanan semakin meninggi (Waltz 2000).

Implikasi dari kondisi seperti itu, negara perlu menggunakan strategi diplomasi yang kontekstual. Nye (2011: xiv) mengatakan, *power* selalu tergantung pada konteks. Artinya, jika konteks yang dihadapi menuntut pemerintah menggunakan *hard power*, maka pemerintah seharusnya menggunakannya. Begitu pula sebaliknya, ada situasi dimana pemerintah perlu menggunakan strategi *soft power*. Sebagai contoh, ketika kedaulatan terancam oleh pelanggaran yang dilakukan negara lain maka strategi *hard power* perlu dikedepankan. Alasannya, pemerintah akan kesulitan mengatasi masalah itu dengan hanya mengandalkan kekuatan nilai, norma dan budaya yang dimiliki. Dalam situasi dimana keputusan harus diambil secara cepat dan tepat, menjatuhkan pilihan pada strategi *soft power* dalam situasi konfliktual terlalu riskan. Dalam situasi yang berbeda, misalnya ketika ancaman bersifat laten dalam arti ancaman tersebut tidak di depan mata, pemerintah bisa mengandalkan *soft power* untuk mengikis potensi ancaman tersebut dan mengubahnya menjadi peluang yang menguntungkan. Dengan demikian, makna kalimat “menjadikan musuh menjadi teman, teman menjadi mitra” (Yudhoyono 2005) merupakan bagian dari strategi *soft power* untuk mengubah hubungan konfliktual menjadi kerjasama secara gradual. Kesimpulannya, dalam konteks ancaman nyata dan mendesak (*urgent*) maka pilihan strategi *hard power* lebih tepat, sementara dalam konteks ancaman yang potensial maka pilihan strategi *soft power* lebih tepat.

Pendekatan diplomasi SBY sepertinya tidak mempertimbangkan konteks yang dihadapi. Pemerintah terlanjur percaya pada manfaat *soft diplomacy* dalam memecahkan segala persoalan hubungan antar bangsa. *Soft diplomacy* mengedepankan pendekatan dialog konstruktif tanpa melibatkan unsur paksaan dan ancaman. *Soft diplomacy* penting untuk membangun rasa saling percaya (*trust*) supaya segala persoalan bisa teratasi dengan *win-win solution*. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan kepala dingin alih-alih emosi yang cenderung reaksioner. Pendekatan diplomasi ini dilakukan dalam kerangka gagasan ‘*a million friends zero enemy*’ yakni menegaskan komitmen Indonesia bahwa Indonesia tidak memandang negara lain sebagai musuh. Indonesia selalu beritikad baik dalam melaksanakan hubungan luar negeri dalam suasana konfliktual dengan tidak memperkeruh keadaan misalnya menggelar kekuatan militer sebagai strategi *deterrence*. Kendati negara lain menunjukkan sikap tidak ramah, Indonesia harus bisa menunjukkan sikap sebaliknya. Hanya dengan pendekatan itulah masalah hubungan antar negara bisa diatasi.

Komitmen SBY pada *soft power* sedikit banyak dipengaruhi oleh momen kebangkitan Asia. Pergeseran kekuatan global yang ditandai dengan bangkitnya China dan India dalam hal ekonomi membuat Indonesia optimis bahwa kerjasama adalah satu-satunya cara agar dapat memenangi peluang di abad-21. Dalam pidatonya ketika membuka Sidang Pleno ke 4 Asian Parliamentary Assembly (APA) menyatakan secara tegas bahwa Asia adalah kawasan yang penuh harmoni dan sejahtera.

Saya sungguh percaya, bahwa kunci dari masa depan Asia yang damai dan sejahtera, terletak pada kapasitas kita untuk membangun dan menyebarkan *soft power*. Apabila abad 21 dapat kita jadikan abad *soft power*, kita akan mewujudkan suatu Asia yang berbeda (detik.com 2009).

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme SBY dalam merespon kebangkitan Asia atau *Asian Century*. Konflik adalah tema masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam karena sudah ketinggalan jaman. Sebaliknya, kerjasama harus terus ditingkatkan dengan semua bangsa di dunia untuk mencapai tujuan nasional.

Implementasi *soft power* sebagai pendekatan diplomasi Indonesia tak lepas dari pengaruh gagasan Nye. Nye memang pernah mengatakan bahwa dalam abad informasi dewasa ini, *soft power* memang perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hanya saja, pandangan SBY tentang dunia terlalu monolitik. SBY melihat dunia dalam kacamata kaum liberal yang serba optimis dan progresif. SBY sepertinya mengabaikan elemen konflik dan ancaman sebagai bagian tak terpisahkan dari relasi antar negara. SBY begitu percaya *soft power* bisa mengatasi segala persoalan. SBY sepertinya lupa bahwa *soft power* hanya salah satu sisi dari *power*. Ketika *soft power* lebih relevan untuk mencapai tujuan negara dalam iklim globalisasi, bukan berarti mengesampingkan atau bahkan menghilangkan *hard power*. Lagipula, akan menjadi sebuah paradoks apabila pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran pertahanan jika ternyata alat negara tersebut sia-sia karena tidak digunakan. Pemerintah sepertinya 'alergi' menggunakan pendekatan koersif menyangkut isu-isu sensitif seperti kasus pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh negara tetangga.

Dalam hal ini Presiden SBY agaknya keliru dalam menafsirkan konsep *soft power* yang dicetuskan Nye. Pernyataan SBY di Universitas Harvard bahwa abad-21 adalah abad *soft power* dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan SBY terhadap kenyataan bahwa konflik-konflik antar negara masih menyelumuti hubungan internasional abad-21 sekalipun pada saat bersamaan kerjasama baik bilateral maupun multilateral kian meningkat signifikan. Nye sendiri sebagai pencetus konsep-konsep itu tidak pernah mengatakan bahwa *soft*

power akan menggantikan *hard power*. Ketika berbicara di Central European University, Nye (2011) mengatakan bahwa,

Terkadang orang menafsirkan apa yang saya tulis dengan mengatakan: "oh, *soft power* menggantikan atau menyingkirkan *hard power*; militer dan ekonomi". Apa yang ingin saya katakan adalah *soft power* merupakan bagian dari keseluruhan alat yang kita gunakan atau kita butuhkan ketika berpikir tentang strategi.

Pernyataan Nye ini menggarisbawahi poin penting gagasannya bahwa *soft power* hanyalah salah satu sisi kekuasaan yang sama sekali tidak mereduksi gagasan tentang *hard power*. Dalam tulisannya yang lain, Nye (2009: 160) meluruskan anggapan keliru banyak orang mengenai konsep *soft power* yang ia ajukan dengan mencetuskan gagasannya tentang '*smart power*'. Konsep tersebut ia kembangkan sebagai cara untuk meyakinkan banyak kalangan bahwa penggunaan *soft power* saja tidak bisa menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif.

Dalam dunia diplomasi, pemerintah kerap melakukan kesalahan perihal memilih strategi apa yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kesalahan ini bisa terjadi karena mispersepsi atau irasionalitas pembuat kebijakan. Irasionalitas bisa muncul lantaran cara pandang elit yang dikotomistis atau monolitik. Cara pandang 'sejuta teman tidak ada musuh' dapat dimaknai sebagai cara pandang yang monolitik karena itu berarti mengingkari keberadaan pihak-pihak yang berniat memusuhi. Menurut Mandel (1984), salah satu ciri kebijakan luar negeri yang irasional adalah kebijakan luar negeri yang terlampau hati-hati dan lamban (*stick-in-the-mud irrationality*). Kebijakan luar negeri yang hati-hati sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari resiko buruk misalnya perang dengan negara lain. Tetapi masalahnya, kebijakan yang terlampau hati-hati akan melanggengkan kondisi *status quo* dan struktur hirarkis dalam hubungan antar bangsa (Mandel 1984: 658). Kelihatannya paradoks apabila prinsip kehati-hatian seorang pemimpin dianggap sebagai tindakan irasional. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa kehati-hatian dalam arti irasional tidak sama dengan kehati-hatian dalam arti *prudence* sebagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin saat pengambilan keputusan. Kehati-hatian seorang pemimpin dapat dikategorikan ke dalam tindakan irasional karena akan menjerumuskan negara ke dalam situasi yang dapat merugikan negara itu sendiri. Misalnya, Kehati-hatian memang penting, namun jika terlalu berlebihan bisa menjadi bumerang bagi negara itu sendiri.

Kebijakan SBY yang terlampau hati-hati dalam menanggapi kasus penangkapan tiga petugas KKP di atas dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang irasional. Dikatakan irasional sebab pendekatan *soft diplomacy* yang

dipilih SBY berpotensi melanggengkan *status quo* dan struktur hirarkis antara Indonesia dan Malaysia. *Status quo* yang dimaksud adalah kondisi hubungan antar kedua negara akan cenderung konfliktual di masa yang akan datang. Kehati-hatian SBY akan memberikan dampak positif dalam jangka pendek, misalnya dalam urusan TKI dan kerjasama ekonomi. Namun sikap kehati-hatian itu menciptakan preseden bahwa pemerintah Indonesia tidak berani menggertak Malaysia sehingga dalam jangka panjang peristiwa serupa bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Sementara itu, pendekatan *soft diplomacy* SBY juga akan melanggengkan struktur hirarkis antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks pola interaksinya. Meskipun secara legal-institusional hubungan kedua negara adalah sejajar, namun dalam praktiknya Indonesia seolah-olah menjadi subordinat Malaysia. Konsesi-konsesi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Malaysia untuk meredakan ketegangan antar kedua negara menjadi bukti bahwa Indonesia *powerless* di hadapan Malaysia.

Menolak menggunakan *hard power* karena terlalu percaya pada efektivitas *soft power* menimbulkan apa yang disebut sebagai 'paradoks kepentingan nasional'. Paradoks kepentingan nasional adalah situasi dimana keinginan untuk meraihnya malah menyebabkan kerugian. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara *tujuan* dan *cara* yang digunakan (Rosyidin 2012: 414). Misalnya, tujuan semua negara di dunia adalah menjaga kedaulatan atau membela warga negara. Seandainya ada negara lain yang melakukan pelanggaran terhadap keduanya, maka cara diplomasi tidak akan efektif. Hal ini karena sikap yang ditunjukkan negara lain tersebut adalah sikap permusuhan. Jika ditanggapi dengan santun, maka kerugian akan berada pada pihak negara yang dilanggar.

Pemikiran tersebut bukan berarti menganjurkan supaya negara selalu mengedepankan cara-cara kekerasan. Perang selalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, perang bisa menjauhkan negara dari peluang kerjasama dengan negara lain. Resiko itu hanya terjadi hanya jika pemerintah menggunakan kebijakan luar negeri yang agresif dan emosional. Diplomasi idealnya harus dijauhkan dari sikap reaksioner dan terkesan membabi-butu. Akan tetapi poin penting yang perlu digarisbawahi adalah kekuatan militer sebagai alat pendukung diplomasi semestinya tidak dipandang sebagai hal yang tabu. Sampai kapanpun, pendekatan koersif tetap penting. Hanya saja, kapan waktunya ia digunakan memerlukan pertimbangan yang rasional.

Rasionalitas SBY memilih langkah diplomasi memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. *Soft diplomacy* mungkin dapat mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam jangka pendek. Dengan tidak melawan Malaysia, Indonesia setidaknya tidak kehilangan aset strategis di Malaysia yaitu aset ekonomi.

Dengan menghindari opsi *gunboat diplomacy*² yang bernuansa *hard power*, Indonesia berarti ikut serta dalam menjaga stabilitas kawasan dan keutuhan ASEAN. Namun pada saat yang sama pemerintah gagal menjaga kewibawaan negara dan harga diri (*self-esteem*) bangsa di hadapan negara lain. Menjaga kewibawaan dan harga diri bangsa adalah kepentingan jangka panjang yang menjamin keberlangsungan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Survabilitas atau kemampuan mempertahankan diri tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga kewibawaannya.

Turunnya kewibawaan dan harga diri suatu negara dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup negara tersebut. Dalam konteks relasi antar bangsa, status negara tidak hanya dibentuk oleh kedaulatan yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) seperti kekuasaan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya tetapi juga kedaulatan yang berorientasi keluar (*outward looking*) yaitu pengakuan sebagai anggota masyarakat internasional (Wendt 2004: 294). Secara psikologis, pengakuan oleh negara lain ini mengisyaratkan adanya penerimaan secara sederajat (*egaliter*). Sama seperti individu manusia, negara juga menginginkan 'keamanan ontologis' (Mitzen 2006) yaitu terhindar dari ancaman terhadap identitas dan harga dirinya. Kepentingan nasional dalam konteks keamanan tidak hanya bersifat fisik seperti melindungi batas wilayah dan penduduk, tetapi juga bagaimana negara tersebut diperlakukan dengan hormat oleh negara lain (*honorable*). Rasa hormat (*honor*) erat hubungannya dengan harga diri (*self esteem*), yaitu pengakuan negara lain terhadap keberadaan suatu negara (Lebow 2008: 64). Inilah sebabnya tindakan sewenang-wenang Malaysia terhadap Indonesia tidak dapat dibenarkan dalam kacamata keamanan ontologis tersebut. Jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah preventif, kejadian seperti yang dilakukan Malaysia itu bukan tidak mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Kesimpulan dan rekomendasi

Pendekatan *soft diplomacy* SBY dalam merespon pelanggaran kedaulatan oleh Malaysia merupakan konsekuensi dari cara pandang yang keliru dalam melihat politik dunia. Howard Lentner (2004: 1) mengingatkan bahwa, "Sebagaimana semua aktivitas politik, baik kerjasama maupun konflik selalu hadir, dominasi dan perlawanan selalu muncul, serta persaingan pun ada di mana-mana." Frederick Agung dari Prussia mengatakan bahwa, "Diplomasi

2 *Gunboat diplomacy* atau diplomasi kapal meriam adalah sebutan untuk diplomasi yang melibatkan kekuatan militer. James Cable (dalam Dunaway 1991: 35-36) mendefinisikan *gunboat diplomacy* sebagai "penggunaan atau ancaman kekuatan angkatan laut secara terbatas, bukan [dimaksudkan] sebagai tindakan perang, [tetapi] untuk mengamankan kepentingan, atau untuk mencegah kekalahan, baik dalam sengketa internasional atau melawan negara lain dalam wilayah atau yurisdiksi negara bersangkutan". Penggunaan konsep *gunboat diplomacy* untuk saat sekarang mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya terbatas pada kekuatan angkatan laut tetapi kekuatan militer secara umum.

tanpa kekuatan militer ibarat musik tanpa instrumen". Fanatisme terhadap *soft power* dapat membuat diplomasi Indonesia menjadi lembek dan tidak berkarakter. Sah-sah saja menganggap Malaysia merupakan negara sahabat, 'saudara serumpun', mitra dagang terbesar, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika negara yang dipersepsi sebagai sahabat tersebut menunjukkan sikap permusuhan dengan Indonesia, pemerintah semestinya menanggapi dengan sikap tegas. Tegas tidak berarti perang. Tegas berarti menunjukkan bahwa Indonesia bukan 'boneka mainan' yang akan tinggal diam jika diperlakukan tidak adil.

Dalam rangka membangun landasan diplomasi yang kokoh dan berkarakter, Indonesia mutlak kembali ke Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai yang komprehensif termasuk urusan politik luar negeri. Sila ke-II "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mengandung pengertian bahwa Indonesia menghendaki prinsip kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia tidak naif dalam menyadari realitas-realitas hubungan internasional yang jauh dari kerangka idealitas (Latif 2011: 215). *Hard power* dan *soft power* ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pilihan pendekatan *hard power* saja dalam hubungan antar negara jelas tidak bijak dan kontraproduktif. Menggunakan *soft power* saja untuk menyikapi tindakan negara lain yang melanggar kedaulatan negara juga tidak efektif. Oleh sebab itu, pendekatan yang perlu dikembangkan pemerintah Indonesia adalah strategi *smart power*. Kombinasi antara *hard power* dan *soft power* sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru sebaliknya, *smart power* sangat sejalan dengan Pancasila sebagai strategi diplomasi yang efektif dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Sebagaimana karya ilmiah lainnya, tulisan ini tidak lepas dari kekurangan. Tulisan ini berpendapat bahwa konsep *soft power* sebenarnya kurang relevan untuk memahami kebijakan SBY terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Seperti telah dibahas sebelumnya, *soft power* adalah strategi alternatif selain *hard power*, tetapi bukan berarti menggantikan strategi *hard power*. Strategi ini menekankan pada penggunaan unsur-unsur non-koersif seperti nilai-nilai, norma-norma, budaya, ideologi untuk menarik negara lain. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan negara lain tanpa perlu menggunakan tekanan dan paksaan. Persoalannya, pada saat SBY memilih pendekatan diplomatik terhadap Malaysia, unsur-unsur tersebut sama sekali tidak memainkan peran. Sederhananya, SBY hanya melakukan upaya diplomatik melalui dialog untuk meredakan ketegangan kedua negara. Hal ini berarti menampik anggapan kebanyakan kalangan yang menilai bahwa kebijakan SBY itu mencerminkan penggunaan *soft power*; sama sekali bukan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri SBY terhadap Malaysia dalam isu penangkapan tiga petugas KKP itu merupakan wujud mispersepsi SBY terhadap sikap dan tindakan

negara lain. SBY tidak melihat persoalan secara obyektif tetapi lebih condong pada preferensi subyektif. Padahal, ada resiko yang jauh lebih besar di balik keputusan tersebut yakni terkait wibawa dan harga diri pemerintah Indonesia di hadapan Malaysia. Kepentingan ini jelas lebih dari sekedar kepentingan strategi jangka pendek seperti kepentingan ekonomi atau alasan moral sebagai saudara serumpun. Kesimpulan ini memperkuat teori mispersepsi yang mengatakan bahwa faktor psikologi pembuat kebijakan berperan penting dalam membentuk hubungan konfliktual antar negara (Jervis 1968 & 1976). Konsekuensi dari mispersepsi pengambil kebijakan dalam situasi konfliktual adalah kebijakan luar negeri yang irasional, yaitu kebijakan yang berpotensi merugikan negara tersebut. Jika Malaysia kembali melakukan pelanggaran, berarti itu membuktikan bahwa keputusan SBY memilih pendekatan diplomatik telah gagal karena keputusan itu terbukti tidak mampu mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi, mispersepsi pembuat kebijakan dapat menyebabkan irasionalitas kebijakan luar negeri. ●

Referensi

- Dahl, R. 1957. "The Concept of Power," *Behavioral Science*, Vol. 2, No. 3 (July), pp. 201-215.
- Detik. 2009. *Soft power untuk Asia yang berbeda*, <<http://news.detik.com/read/2009/12/08/130400/1256067/10/soft-power-untuk-asia-yang-beda>>, diakses pada 3 Oktober 2012.
- Dunaway, W.M. 1991. *Gunboat Diplomacy in A New World Order: Strategic Consideration for U.S Naval Intervention in the Twenty-First Century*, M.A thesis, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tuft University.
- Faizasyah, T. 2012. *Polugri 101 Kutipan Presiden SBY Mengenai Diplomasi & Hubungan Internasional*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Heinl, R.D. 1966. *Dictionary of Military and Naval Quotations*. Annapolis: United States Naval Institute.
- Jervis, R. 1968. "Hypotheses on Misperception," *World Politics*, Vol. 20, No. 3 (April), pp. 454-479.
- Jervis, R. 1976. *Perception and Misperception in International Politics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Juwana, H. 2010. *Kisruh Indonesia-Malaysia di Perbatasan*, Kompas, 24 Agustus.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lebow, R.N. 2008. *A Cultural Theory of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lentner, H.H. 2004. *Power and Politics in Globalization: The Indispensable State*. London: Routledge.

- Mandel, R. 1984. "The Desirability of Irrationality in Foreign Policy Making: A Preliminary Theoretical Analysis," *Political Psychology*, Vol. 5, No. 4, pp. 643-660.
- Mitzen, J. 2006. "Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma," *European Journal of International Relations*, Vol. 12, No. 3, pp. 341-370.
- Morgenthau, H.J. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* 5th edn. New York: Alfred Knopf.
- Natalegawa, M. 2010. *Indonesia and the World 2010*, The Jakarta Post, 26 January.
- Nye, J.S. 1990a. "Soft Power," *Foreign Policy*, No. 80, (Autumn), pp. 153-171.
- Nye, J.S. 1990b. "The Changing Nature of World Power," *Political Science Quarterly*, Vol. 105, No. 2 (Summer), pp. 177-192.
- Nye, J.S. 2002. *The Paradox of American Power: Why The World's Only Superpower Can't Go It Alone*. New York: Oxford University Press.
- Nye, J.S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Nye, J.S. 2009. "Get Smart: Combining Hard and Soft Power," *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 4 (July-August 2009), pp. 160-163.
- Nye, J.S. 2011a. *The Future of Power*. New York: Public Affairs.
- Nye, J.S. 2011b. *Global Power in The 21st Century*, Lecture at Cental European University, September 26, 2011, <<http://archive.ceu.hu/video/2011-09-26/at-ceu-joseph-nye-talks-global-power-in-the-21st-century>>, diakses pada 20 Maret 2014.
- Rosyidin, M. 2012. "Globalisasi dan Paradoks Kepentingan Nasional: Million Friends Zero Enemy," *Analisis CSIS*, Vol. 41, No. 3 (September), pp. 399-423.
- Roy, S. L. 1984. *Diplomasi*, terj. Herwanto dan Mirsawati. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tribunnews. 2010. *JK: Prinsip Politik Luar Negeri SBY tidak Realistis*, <<http://www.tribunnews.com/2010/08/19/prinsip-sby-semua-teman-tidak-ada-lawan-adalah-prinsip-pedagang>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Tribunnews. 2010. *Malaysia Langgar HAM*, <<http://www.tribunnews.com/2010/08/25/malaysia-langgar-ham>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Vermonte, P. 2010. *Pidato SBY dan Opini Publik*, <<http://news.liputan6.com/read/294388/pidato-sby-dan-opini-publik>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Vivanews. 2010. *RI Pilih Hadapi Malaysia dengan Diplomasi*, <<http://politik.news.viva.co.id/news/read/174887-ri-pilih-hadapi-malaysia-dengan-diplomasi>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Vivanews. 2010. *Menlu Malaysia: Kami Protes*, <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/173428-menlu-malaysia-kami-terhina>>, diakses pada 21 Maret 2014.

- Vivanews. 2010. *Dagang Indonesia-Malaysia, Siapa Untung?*, <<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/174056-dagang-indonesia-malaysia-siapa-untung->>, diakses pada 21 April 2014.
- Waltz, K. 2000. "Structural Realism After Cold War," *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer), pp. 5-41.
- Wendt, A. 2004. "The State as person in International Theory," *Review of International Studies*, Vol. 30, pp. 289-316.
- Wolfers, A. 1962. *Discord and Collaborations: Essays on International Politics*. Baltimore: John Hopkins Press.
- Yudhoyono, S.B. 2005. *Speech By President of The Republic of Indonesia Before The Indonesian Council on World Affairs (ICWA)*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2005/05/19/332.html>>, diakses pada 19 April 2013.
- Yudhoyono, S.B. 2008. *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2008/04/02/875.html>>, diakses pada 17 Mei 2012.
- Yudhoyono, S.B. 2009. *Towards Harmony Among Civilizations*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2009/09/30/1228.html>>, diakses pada 16 April 2013.
- Yudhoyono, S.B. 2010. *Pidato Presiden RI mengenai Dinamika Hubungan Indonesia-Malaysia*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2010/09/01/1473.html>>, diakses pada 23 April 2014.